



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan aksi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerapkan *Fraud Control Plan* (FCP) yang memuat strategi pengendalian kecurangan dan diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan secara efektif yang pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dengan pembentukan Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan sesuai dengan perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Juni 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAWA YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 193 Tahun 2024
Tentang : Satuan Tugas Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Kota
Pagar Alam
Tanggal : 20 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

- a. Penanggung Jawab : Wali Kota Pagar Alam.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Wakil Ketua : Inspektur Kota Pagar Alam.
- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam.
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPIN YUDHA KURNIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 193 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
 DAN TIM TINDAK LANJUT PROGRAM
 PEMBERANTASAN KORUPSI
 TERINTEGRASI PEMERINTAH KOTA
 PAGAR ALAM TAHUN 2024
 TANGGAL : 20 Juni 2024

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2024
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PERENCANAAN	13	13.00	100%								
	1. Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%								
	a. Pembinaan atas Dokumen RKPD	50%	50%	100%	100%							
				100%	100%	1. Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun.						Inspektorat
						2. Surat hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPD Tahun 2025 Kabupaten/ Kota oleh Provinsi.						Bappeda
						3. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Dirjen Bangda atau Provinsi.						Inspektorat
						4. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Tahun 2025.						
						5. Dokumen rincian RKPD 2025 dari SIPD RI. Rincian RKPD dimaksud memuat sub kegiatan, sumber dana, lokasi pelaksanaan kegiatan, rincian lokasi, waktu pelaksanaan, anggaran sub kegiatan yang dibuktikan dengan screenshot SIPD RI.						Bappeda
						Catatan: Reviu dilakukan atas dokumen RKPD 2025.						
	b. Pokok Pikiran	50%	50%	100%	100%	Input Pokir						
				30%	30%	1. Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PA/KPA), dan penyedia.						Bappeda
						2. Dokumen hasil Input Pokok Pikiran (Pokir) dalam SIPD.						Bappeda
						3. Hasil validasi/ status Pokir di dalam SIPD.						
				20%	20%	4. Dokumen pokir yang disampaikan dari Banggar DPRD kepada Kepala Daerah melalui TAPD.						Bappeda
						Catatan: > Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 Permendagri 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah). > Dasar hukum: Tata Tertib Khusus PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, Pasal 54 huruf (a).						

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
					<p>Catatan:</p> <p>> Penyampaian dan Penginputan Pokir DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 Permendagri 86/ 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah), > Dasar hukum: Tata Tertib Khusus PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, Pasal 54 huruf (a).</p>							
			50%	50%	<p>Pengawasan Pelaksanaan Pokir Laporan pengawasan atas pelaksanaan pokok pikiran oleh OPD Teknis pelaksana pokok pikiran.</p> <p>Catatan:</p> <p>> Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan pokir. > Laporan disusun oleh masing-masing OPD Teknis pelaksana pokok pikiran yang menggambarkan hasil pengawasan pokir yang dilaksanakan tahun 2024 mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pokok pikiran. 2. Realisasi keuangan dan fisik. 3. Penerima manfaat pokir. 4. Lokasi. 5. Dokumentasi hasil pengawasan. 					Bappeda		
II.	PENGANGGARAN	13	10.40	80%								
	1. Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	25%	13%	50%								
	a. Standar Harga Satuan (SHS)	50%	30%	60%	100%							
					Penetapan SHS							
			10%	10%	1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025.							
			20%	20%	2. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025.							
			15%	40%	3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal.							
					<p>Catatan:</p> <p>Penyedia jasa dipastikan yang sudah mendapatkan <i>approval</i> oleh <i>supplier</i> (Perpres 12/2021 PBJ).</p>						BKD	
			15%	30%	<p>Implementasi SHS</p> <p>Hasil penginputan SHS di aplikasi SIPD RI (hasil unduh dokumen dari SIPD RI dalam bentuk pdf) yang menunjukkan bahwa seluruh SHS telah diinput dalam SIPD RI TA 2025.</p>							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
	b. Analisis Standar Biaya (ASB)	50%	20%	40%	100%							
				10%	30%	Penetapan ASB Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025. <u>Catatan:</u> 1. ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan, dll. 2. ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst. Dokumen yang disampaikan adalah penilaian dilakukan atas penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2025.					BKD	
				10%	20%	Kelengkapan ASB 1. Dokumen yang menunjukkan ketersediaan ASB fisik dan non fisik. 2. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi antar OPD dalam penyusunan ASB. 3. Dokumen yang menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan/ atau utilisasi data/pedoman Instansi vertikal dalam penyusunan ASB.					BPKD	
				10%	10%	Implementasi ASB <i>Screenshot</i> menu dan hasil Input ASB dalam aplikasi perencanaan TA 2025 (SIPD RI).						
				10%	40%	Reviu APIP Dokumen hasil reviu APIP yang mencakup implementasi ASB, dan kelengkapan ASB (berapa kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ pemda yang seharusnya menggunakan ASB).					Inspektorat	
	2. Penetapan APBD	25%	25%	100%								
	a. KUA dan PPAS	34%	34%	100%	100%							
				50%	50%	1. Dokumen Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD. 2. Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas. 3. Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan KUA dan PPAS yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD.					BKD	
				50%	50%	4. Dokumen kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS 2025.						
	b. Reviu RKA	33%	33%	100%	100%							
				100%	100%	<i>Screenshot</i> hasil reviu RKA 2025 dalam sistem SIPD RI. <u>Catatan:</u> > Reviu RKA dilakukan oleh APIP. > Minimal <i>screenshot</i> RKA 10 sub kegiatan dari 5 SKPD/ OPD dengan pagu alokasi anggaran terbesar (diambil dari SIPD RI). > Bukti cetakan RKA diberikan bukti tanda bahwa dicetak melalui SIPD RI.					Inspektorat	
	c. Penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD	33%	33%	100%	100%							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
				30%	30%	Penyerahan RAPBD Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12/2019) atau tanggal 1 Oktober 2024.					BKD	
				30%	30%	Persetujuan APBD Dokumen Persetujuan RAPBD 2025 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12/2019) atau tanggal 1 Desember 2024).						
				40%	40%	Penetapan APBD 1. Dokumen matrik tindak lanjut hasil evaluasi yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD. 2. Surat pengajuan permintaan nomor register ke Biro Hukum Kemendagri atau ke Biro Hukum Provinsi untuk Kabupaten/ Kota.						

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%									
3.	Transparasi APBD	25%	25%	100%									
	d. Publikasi APBD	100%	100%	100%	100%								
				100%	100%	1. Screenshot publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan. 2. Link website publikasi APBD Tahun 2024 sebagai bahan konfirmasi. Catatan: Publikasi APBD Tahun 2024 mencakup Perda APBD Tahun 2024 dan Ringkasan APBD Tahun 2024.						BKD	
4.	Pengendalian dan Pengawasan	25%	18%	70%									
	a. Bantuan Pemerintah	50%	35%	70%	100%								
						Penilaian Pelaksanaan Evaluasi							
			10%	10%		> Laporan Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Provinsi/ Hibah/ Bantuan Sosial. (program, penerima, dan nilai).							
			10%	10%		> Perkada tata cara pemberian keuangan bersumber dari APBD tahun terakhir (setelah terbit PP 12/2019).						BPKD	
			10%	10%		> Dokumen/ laporan formulasi perhitungan bantuan keuangan bersumber dari APBD tahun berkenaan.							
			10%	10%		> Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos bersumber dari APBD tahun berkenaan.							
			10%	10%		> Dokumen Perkada hibah bansos yang terakhir (terbit setelah Permendagri 77/2020)							
			20%	50%		Evaluasi Realisasi							
						Bantuan Keuangan							
						> Data rekapitulasi pengajuan Bantuan Keuangan.						BKD	
						> Dokumen perencanaan dari Provinsi dalam memberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/ kota (untuk provinsi).						BKD	
						> Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.						BKD	
						> Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan.							
						> Dokumen formulasi perhitungan pemberian Bantuan Keuangan.							
						> Data realisasi Bantuan Keuangan.							
						> Hasil audit AP/ P, BPK, BPKP atas Bantuan Keuangan.						Inspektorat	
						Hibah dan/ atau Bantuan Sosial							
						> Pakta Integritas/ Deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, OPD pelaksana (PA/KPA), dan penyedia.						Bappeda	
						> Data Pengajuan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.							
						> Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.						Bappeda	
						> Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah bansos.							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
						> Dokumen Perkada tentang hibah bansos.					BKD	
						> Data realisasi Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.					BKD	
						> Rincian penerima hibah dan/ atau bantuan sosial.					BKD (mengkoordinir)	
						> Dana sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.					Bappeda	
						> Hibah diberikan kepada organisasi yang diakui.					Bappeda (mengkoordinir)	
						> Hasil audit APIP, BPK, BPKP atas Hibah dan/ atau Bantuan Sosial.					Inspektorat	

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
	b. Honorarium dan Perjalanan Dinas	50%	35%	70%	100%							
						Audit APIP > Rekapitulasi anggaran dan realisasi perjalanan dinas pada masing-masing OPD. > Rekapitulasi anggaran dan realisasi honorarium pada masing-masing OPD.					Inspektorat	
			10%	25%		> Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi.						
			10%	25%		> Laporan Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi.						
				25%	25%	Tindak Lanjut Audit APIP > Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi.					Inspektorat dan 3 SKPD (Menunggu Hasil Audit)	
				25%	25%	> Tindak Lanjut atas Hasil Audit APIP terhadap realisasi honorarium pada 3 OPD dengan anggaran honorarium tertinggi.					Inspektorat (Menunggu Hasil Audit)	
III.	PENGADAAN BARANG DAN JASA	13	11.70	90%								
	1. Pelaksanaan Pengadaan	34%	24%	71%								
	a. Reviu dan Konsolidasi Pengadaan	50%	41%	81%	100%							
				10%	20%	Reviu Perencanaan Pengadaan 1. Notulensi rapat yang dipimpin Sekda dalam rangka pelaksanaan reviu dan konsolidasi PBJ.					Bag PBJ	
			21%	30%	2. Dokumen hasil reviu PBJ tahun 2024 yang dilaksanakan oleh UKPBJ atau PA atau PPK. - Dinas PUPR - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan							
			30%	30%	Konsolidasi Pengadaan 1. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan dan menghasilkan daftar proyek strategis Pemda. - Dinas PUPR - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan					Bag PBJ		
			20%	20%	2. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan terutama pada pelaksanaan PBJ rutin, misalnya: ATK, alat kebersihan, dst.							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%	%								
	b. Transparansi dan TKDN	50%	30%	60%	100%								
				5%	15%	SIRUP							
				10%	15%	1. Dokumen yang menunjukkan kepatuhan input SIRUP per 31 Maret 2024. 2. Dokumen yang menunjukkan Pemda telah melaksanakan updating/ revisi SIRUP dan perubahan posisi SIRUP setelah revisi.						Bag PBJ	
				5%	15%	e-Purchasing 1. Dokumen yang menunjukkan 40% nilai anggaran belanja barang/ jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri (per 31 Desember							Bag PBJ
				5%	15%	2. Dokumen yang menunjukkan realisasi nilai transaksi 30% dari total nilai belanja pengadaan (per 31 Desember 2024).							Bag PBJ
				5%	10%	3. Pakta Integritas PBJ melalui e-purchasing pada 10 PBJ melalui e-purchasing tertinggi.							Bag PBJ
				30%	30%	Tingkat Komponen Dalam Negeri 1. 10 Kontrak/ SPK PBJ yang menunjukkan bahwa barang telah memenuhi penggunaan dengan komponen TKDN. Kontrak didukung dengan Sertifikat TKDN Kemenperin untuk memastikan Pemenuhan TKDN. Diutamakan pada Pengadaan Alkes dan Elektronik. 2. Laporan hasil reviu APIP terhadap pemenuhan TKDN pada 10 Kontrak PBJ (poin 1).							Bag PBJ (mengkoordinir)
												Inspektorat	
2.	Pengendalian PBJ Strategis	33%	33%	100%									
	a. Reviu HPS	34%	34%	100%	100%								
				50%	50%	1. Laporan hasil reviu HPS yang dilaksanakan oleh APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda. 2. Rekapitulasi Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda.							Inspektorat dan Bag PBJ
				50%	50%	3. Laporan Tindak Lanjut OPD terhadap Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Pemda. 4. % tindak lanjut OPD terhadap Catatan Hasil Reviu APIP pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda.							SKPD PBJ Strategis (Menunggu Hasil Reviu) Inspektorat dan SKPD PBJ Strategis
	b. Lelang Dini	33%	33%	100%	100%								
				100%	100%	1. Dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan lelang dini pada 5 kegiatan PBJ Strategis Infrastruktur Pemda tahun 2025. 2. Rekapitulasi kegiatan PBJ tahun 2025 yang telah dilaksanakan lelang dini pada tahun 2024.							Bag PBJ
	c. Kepatuhan PBJ Strategis	33%	33%	100%	100%								
				10%	10%	Penetapan Proyek Strategis 1. SK Kepala Daerah tentang PBJ Strategis Infrastruktur Tahun 2024.							Bag PBJ
				10%	10%	2. Pakta Integritas Konsultan Pengawas Pekerjaan pada 5 proyek strategis infrastruktur Pemda.							Bag PBJ
				20%	20%	3. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).							Bag PBJ (mengkoordinir)

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%									%
				30%	30%	Realisasi Pekerjaan 1. Laporan pemeriksaan pekerjaan periodik oleh PPK. 2. Reviu kontrak proyek strategis oleh biro/ bagian hukum dan tim teknis OPD (kertas kerja).					Bag PBJ, dan OPD Pemilik Paket Strategis Bag PBJ (mengkoordinir)		
				30%	30%	Serah Terima (PHO) Rekapitulasi progress pekerjaan dan serah terima dibandingkan jadwal sesuai kontrak untuk 5 proyek infrastruktur strategis dengan nilai anggaran tertinggi (Daftar proyek strategis lengkap dengan tanggal kontrak, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, progress pelaksanaan, tanggal berakhirnya kontrak, progres saat berakhirnya kontrak yang disahkan oleh konsultan pengawas). Dokumen disetujui oleh PPK dan APIP.					SKPD PBJ Strategis dan Inspektorat		
	3. Independensi UKPBJ	33%	33%	100%									
	a. TPP UKPBJ	100%	100%	100%									
				50%	50%	1. SK penetapan TPP UKPBJ. 2. Daftar ASN dalam UKPBJ yang menerima TPP.						Bag PBJ	
				50%	50%	3. Dokumen yang menunjukkan bukti pembayaran TPP Kepada Pegawai UKPBJ (ASN).							
IV.	PELAYANAN PUBLIK	13	11.70	90%									
	1. Kebijakan Layanan	25%	18%	70%									
	a. Transparansi Tata Ruang	50%	20%	40%	100%	Untuk Kab/Kota berupa: a. Perkada RDTR b. Data Jumlah RDTR Sesuai RTRW.						Dinas PUPR	
	b. Prosedur Pelaksanaan	50%	50%	100%	100%								
				12.5%	12.5%	Prosedur Layanan Pendidikan 1. SOP PPDB						Disdik	
				12.5%	12.5%	2. SOP Mutasi Siswa							
						Catatan: > Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan pendidikan tingkat SD dan SMP.							
				25%	25%	Prosedur Layanan Kesehatan SOP Layanan Kesehatan baik Puskesmas maupun RSUD yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengijil/ penyipuan/ gratifikasi dalam layanan kesehatan. a. SOP Layanan Kesehatan RSUD b. SOP Layanan Kesehatan Puskesmas						RSUD	
						Catatan: > Untuk kabupaten/ kota, SOP terhadap layanan Puskesmas dan RS yang dikelola kabupaten/ kota.						Dinkes	
				12.5%	12.5%	SOP Layanan Kependudukan a. Pengurusan KTP						Disdukcapil	
				12.5%	12.5%	b. Pengurusan Akta Kelahiran, Kematian						Disdukcapil	

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
				25%	25%	SOP Sektor Perizinan 1. Laporan pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi teknis yang disusun oleh DPMPPTSP, menggambarkan proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi kewenangan Pemda selama tahun 2024, dilaksanakan oleh OPD teknis, mencakup: > Hasil rekomendasi Teknis > Jumlah Izin yang dikeluarkan > Kendala dan Hambatan					DPMPPTSP	
2.	Standar Layanan	25%	25%	100%								
	a. Standar Pelayanan	50%	50%	100%	100%							
				50%	50%	Standar Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Perizinan, dan Kependudukan 1. Dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada Standar Pelayanan pada sektor kesehatan, perizinan, dan kependudukan. 2. Rekapitulasi layanan publik yang sudah memiliki Standar Pelayanan dan layanan publik seluruhnya.						
						a. Standar Pelayanan RSUD						RSUD
						b. Standar Pelayanan PUSKESMAS						Dinkes
						c. Standar Pelayanan Disdukcapil						Disdukcapil
						d. Standar Pelayanan DPMPPTSP						DPMPPTSP
				10%	10%	2. Substansi Standar Pelayanan a. Persyaratan						Disdukcapil, RSUD, Dinskes dan DPMPPTSP
				10%	10%	b. Jangka waktu pemrosesan						Disdukcapil, RSUD, Dinskes dan DPMPPTSP
				10%	10%	c. Biaya						Disdukcapil, RSUD, Dinskes dan DPMPPTSP
				10%	10%	d. Alur Proses						Disdukcapil, RSUD, Dinskes dan DPMPPTSP
				10%	10%	e. Informasi Tracking System						Disdukcapil, RSUD, Dinskes dan DPMPPTSP

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%								
	b. Survei Kepuasan Masyarakat	50%	50%	100%	100%							
						1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat dengan memasukkan parameter: a. Persyaratan b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur c. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Produk Layanan f. Penanganan Pengaduan g. Kompetensi Pelaksana h. Perilaku Pelaksana i. Sarana dan Prasarana j. Transparansi Pelayanan k. Integritas Petugas Pelayanan Catatan: SKM dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 dengan 9 unsur SKM dan menambahkan unsur Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.						
				20%	20%	Tingkat partisipasi masyarakat dalam SKM di atas 75 % pada masing - masing layanan: a. Pendidikan pada Disdik b. Standar Pelayanan RSUD c. Standar Pelayanan PUSKESMAS d. Standar Pelayanan Disdukcapil e. Standar Pelayanan DPMTSP						Disdik RSUD Dinkes Disdukcapil DPMTSP
				40%	40%	Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 11 unsur pada: a. Layanan Pendidikan b. Standar Pelayanan RSUD c. Standar Pelayanan PUSKESMAS d. Standar Pelayanan Disdukcapil e. Standar Pelayanan DPMTSP						Disdik RSUD Dinkes Disdukcapil DPMTSP
				40%	40%	2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Rekomendasi.						Disdukcapil, RSUD, Dinkes dan DPMTSP
	3. Kemudahan Layanan Publik	25%	25%	100%								
	a. Aplikasi perizinan online	34%	34%	100%	100%							
				100%	100%	Data jumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda, yang dilayani secara online selama 1 tahun. Catatan: Perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemda dan proses						DPMTSP

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%									%
	b. Media Publikasi	33%	33%	100%	100%								
				40%	40%	Media Publikasi Layanan Publik Sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan: 1. Foto/ <i>softcopy</i> media publikasi <i>offline</i> , seperti brosure, pamflet, leaflet, dll					DPMPTSP (mengkoordinir)		
						Sektor Perizinan							
						Sektor Pendidikan							
						Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)							
						Sektor Kependudukan							
				60%	60%	2. <i>Screenshot</i> media publikasi <i>online</i> , <i>website</i> layanan publik, aplikasi layanan publik.							
						Sektor Perizinan							
						Sektor Pendidikan							
						Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)							
						Sektor Kependudukan							
						3. <i>Link website</i> media publikasi <i>online</i> .							
						Sektor Perizinan							
						Sektor Pendidikan							
						Sektor Kesehatan (RSUD dan Puskesmas)							
						Sektor Kependudukan							
	c. Forum Komunikasi Masyarakat	33%	33%	100%	100%								
				40%	40%	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat					DPMPTSP		
				20%	20%	2. Dokumentasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat							
				40%	40%	3. Rekapitulasi Permasalahan Layanan Publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui FKM.							
	4. Pengendalian dan pengawasan	25%	23%	90%									
	a. Pengawasan Layanan Publik	25%	25%	100%	100%								
				25%	25%	Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan 1. Dokumen perencanaan pengawasan yang disusun DPMPTSP.					DPMPTSP		
				25%	25%	2. Laporan hasil pengawasan yang disusun DPMPTSP.							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan				
			Target			April	Juni	Sept	Des						
			Bobot	%								Pedum 2024	%		
				12.5%	12.5%	Pengawasan Tata Kelola Pendidikan 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kebijakan dan Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 2. Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. 3. Laporan Reviu APIP tentang Pengelolaan Dana BOS. 4. Tindak lanjut hasil reviu Pengelolaan Dana BOS oleh APIP					Disdik				
				12.5%	12.5%										
				12.5%	12.5%										
				12.5%	12.5%										
	b. Layanan Publik Berintegritas	25%	25%	100%	100%							Inspektorat			
													30.0%	30%	1. Rekapitulasi Permasalahan dan Rencana Aksi Perbaikan Layanan Publik.
	40.0%	40%	3. Rekapitulasi capaian pelaksanaan Rencana Aksi Layanan Publik Berintegritas												
	c. Tindak Lanjut Pengaduan	25%	25%	100%	100%	1. Rekapitulasi Pengaduan Layanan Publik pada sektor: > Perizinan > Pendidikan > Kependudukan > Kesehatan 2. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Publik pada: > Perizinan > Pendidikan > Kependudukan > Kesehatan						DPMPPTSP			
												Disdik			
												Disdukcapil			
												Dinkes dan RSUD			
												DPMPPTSP			
												Disdik			
Disdukcapil															
Dinkes dan RSUD															
d. Tindak Lanjut Reviu APIP	25%	15%	60%	100%	1. Laporan Reviu APIP terkait dengan Layanan Publik (Perizinan/Pendidikan/Kependudukan/Kesehatan) 2. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu APIP Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan yang disusun DPMPPTSP.						Inspektorat				
				60%							100%	DPMPPTSP			
V.	PENGAWASAN APIP	12	11.98	100%											
	1. Kapasitas APIP	25%	25%	100%											
	a. Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM	34%	34%	100%	1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD. 2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin).						Inspektorat				
				50%								50%			

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan		
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des				
			Bobot	%									%	
				50%	50%	3. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (Workshop, Seminar, Webinar dan Bimtek). 4. Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf). 5. Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas.						Inspektorat		
	b. Kecukupan Anggaran	33%	33%	100%	100%									
				35%	35%	1. Dokumen anggaran APIP. > Telah dianggarkan untuk pemenuhan sarana & prasarana. 2. Dokumen alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Permendagri 15/2023.							Inspektorat	
				15%	15%	3. Dokumen alokasi pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk setiap SDM APIP (JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional). > Telah dianggarkan untuk pemenuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk setiap SDM APIP (JFA/PPUPD/staf pengawas non fungsional) mencapai target diklat minimum selama 120 Jam.							Inspektorat	
				15%	15%	> Telah dianggarkan untuk pemenuhan sarana & prasarana								
				35%	35%	4. Dokumen alokasi anggaran TPP Inspektorat Daerah > Alokasi anggaran ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, > Terdapat implementasi atas SK Kepala Daerah tersebut. > Keduanya tersebut di atas terpenuhi							Inspektorat	
	c. Level Kapabilitas APIP	33%	33%	100%	100%									
				100%	100%	1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir 2. Hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPKP Jika hasil penilaian oleh BPKP untuk tahun 2024 sudah dikeluarkan oleh BPKP, maka yang digunakan adalah hasil penilaian tahun 2024 oleh BPKP							Inspektorat	
2.	Penguatan Kelembagaan	25%	25%	100%										
	a. Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu (Irbn)	50%	50%	100%	100%									
				5.0%	5%	1. Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbn: > Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbn							Inspektorat	
				10.0%	10%	> Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan Inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya.								
				10.0%	10%	> Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi Inspektur daerah dan/atau Inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota.								

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%	%								
				5.0%	5%	> SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban					Inspektorat		
				5.0%	5%	> Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur atau untuk pengisian jabatan Irban harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri							
				2.5%	2.5%	> Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irban							
				2.5%	2.5%	> Surat Gubernur/ Mendagri menindak- lanjut surat Kada							
				5.0%	5%	> SK Inspektur dan Irban							
				5.0%	5%	> Sertifikat CGCAE untuk Inspektur							
				5.0%	5%	2. Irban yang Melaksanakan PUTT > Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi Inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT.					Inspektorat		
				10.0%	10%	> Laporan pengisian jabatan Irban khusus							
				35%	35%	> Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Kab/Kota dan Laporan Irjen Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Provinsi: > Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten atau Kota menurati Irjen/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus untuk melaksanakan tugasnya > Irjen/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota.							
	b. Pengawasan Dugaan Penyimpangan	50%	50%	100%	100%								
				15%	15%	Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND > Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan yang berkadar pengawasan atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penugasan dari Kepala Daerah.					Inspektorat		
				10%	10%	> Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT.							
				15%	15%	> Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND).							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
				20%	20%	Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen > Laporan yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri terkait dengan Indikasi PWKKND (dihitung proporsional berdasarkan jumlah laporan sebagaimana disebutkan dalam poIn Rekap Laporan PUTT di atas).					Inspektorat	
			5%	5%	> Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP. > Surat penyampalan permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen							
			10%	10%	> Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah per semester yang berisi Informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan							
			10%	10%	> Laporan per 9 Desember 2024 dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan pada tahun 2024							
			15%	15%	Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang di dalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan.							Inspektorat
	3. Pengendalian dan Pengawasan	25%	25%	99%								
	a. Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	34%	33%	98%	100%							
				35%	35%	1. Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.					Inspektorat	
			8%	10%	2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi.							
					3. Laporan penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim: > Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; > Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan; yaitu: > SP4N-LAPOR > website dan surat elektronik							
			10%	10%								
			5%	5%								

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
				5%	5%	> surat, faksimili, SMS dan call center					Inspektorat	
				10%	10%	> Whistleblowing system (WBS)						
				5%	5%	> Media sosial						
				20%	20%	4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematika sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/ 2023.						
	b. Probity Audit	33%	33%	100%	100%						Inspektorat	
				100%	100%	1. Rekapitulasi pelaksanaan probity audit. 2. Laporan Hasil Probity Audit > Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda > Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap: Perencanaan dan Persiapan, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, dan Pemanfaatan (utamakan pada tahap perencanaan/ persiapan). Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024.						
	c. Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi	33%	33%	100%	100%						Inspektorat	
				10%	10%	1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS)						
				10%	10%	2. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB)						
			40%	40%	3. Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap: a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. DPMPTSP d. Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			10%	10%	4. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah: > Rekapitulasi temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah per 31 Desember 2023 > Tabel tentang capaian tindak lanjut temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah							
			20%	20%	5. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar							
			10%	10%	6. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan			
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des					
			Bobot	%									%		
4.	Koordinasi Pencegahan Korupsi	25%	25%	100%											
	a. Tindak Lanjut SPI	50%	50%	100%	100%										
				50%	50%	Tindak Lanjut Rekomendasi SPI Tahun 2023									
				50%	50%	1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2023 yang disampaikan Pemda maksimal dikirimkan tgl 30 April 2024 yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda. 2. Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda.									
	b. Sosialisasi Antikorupsi	50%	50%	100%	100%										
				20%	20%	1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi dengan sasaran: a. Legislatif yang melibatkan unsur: Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD									
				20%	20%	b. Eksekutif yang melibatkan unsur: Kepala OPD dan Jajaran (terutama PBJ dan Layanan Publik), termasuk sosialisasi antikorupsi kepada OPD pengampu area MCP lainnya.									
				10%	10%	c. Masyarakat Sasaran PBJ dan Layanan Publik (Wali Murid, CSO, Pelaku Usaha, Media Massa, Masyarakat Umum).									
						2. Materi sosialisasi menyampaikan program antikorupsi dan program pencegahan korupsi daerah yang telah dilaksanakan Pemda: > Pengenalan Tindak Pidana Korupsi > SPI dan IPAK > Capaian dan Evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaporkan melalui MCP > Pengelolaan dan Evaluasi Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah. > Gratifikasi > Pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i>									
				10%	10%	3. Pelembagaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) a. SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI.									
20%				20%	b. Sertifikasi minimum 1 orang personil PAKSI oleh ACLC KPK										
20%	20%	4. Anggaran sosialisasi antikorupsi.													
VI.	MANAJEMEN ASN	12	10.20	85%											
1.	Tata Kelola ASN	34%	34%	100%											
	a. Perencanaan & Pemenuhan SDM	25%	25%	100%	100%										
				30%	30%	Rencana Kebutuhan dan Pemenuhan ASN									
				30%	30%	1. Dokumen rencana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK untuk jangka waktu 5 tahun (PP 11 Tahun 2017).									
				30%	30%	2. Dokumen usulan formasi kebutuhan PNS dan PPPK yang diusulkan oleh PPK ke Kemenpan RB.									
10%	10%	3. Dokumen penetapan formasi CPNS dan PPPK oleh Kemenpan RB.													
30%	30%	4. Laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dan PPPK.													

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
	b. Evaluasi Jabatan	25%	25%	100%	100%							
				25%	25%	Peta Jabatan & Penyederhanaan Birokrasi > Daftar Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Pemerintah Daerah dan Penyesuaian Sistem Kerja					Bag Organisasi	
				25%	25%	> Peta jabatan berdasarkan Anjab ABK (disusun menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas, dan kualifikasi).						
				20%	20%	Evaluasi Jabatan 1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan)						
				20%	20%	2. Surat Penyerahan/Tanda Terima/ Bukti Pengiriman Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda.						
				10%	10%	3. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan.						
						Catatan: a. Perubahan evaluasi jabatan disesuaikan berdasarkan peraturan Kementrian mengenai struktur organisasi terbaru/terkini. Jika struktur organisasi pemda berubah maka evajab perlu disesuaikan. b. Struktur Organisasi Pemda mengacu dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Permenpan 7 Tahun 2022).						
	c. Sistem Informasi Kepegawaian	25%	25%	100%	100%							
				10%	10%	1. Data kepegawaian secara lengkap yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi, dan kompetensi berbasis teknologi informasi yang dikelola secara <i>update</i> dan <i>realtime</i> (ex. SIMPEGNAS), dan					BKPSDM	
				10%	10%	Data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun berdasarkan jabatan, pangkat, dan unit kerja.						
				30%	30%	2. Dokumen/ bukti absensi pegawai sudah menggunakan/ memanfaatkan sistem elektronik terintegrasi dengan system penilaian Kinerja.						
				20%	20%	3. Penilaian kinerja sudah menggunakan/ memanfaatkan teknologi informasi dan sudah memenuhi unsur: a. Laporan aktivitas harian ASN. b. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung.						
				30%	30%	4. Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja.						

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan					
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des							
			Bobot	%	%												
d. Promosi dan Mutasi		25%	25%	100%	100%												
					10%	10%	Kebijakan Internal 1. Kebijakan Internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) terkait Pola Karir.						BKPSDM				
					10%	10%	2. Kebijakan Internal (Pergub/Perbup/Perwali/SK Kepala Daerah) tentang mutasi dan promosi ke JPT, administrator, dan pengawas secara objektif dan transparan (mengacu pada rencana suksesi).										
					10%	10%	Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JPT) Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi. (berisi a.l Surat permohonan seleksi terbuka ke Provinsi bagi Kab/Kota atau ke Pusat bagi Provinsi, SK Tim/Pansel, Hasil Seleksi, Rekomendasi pelaksanaan ujikom atau selter dari Instansi berwenang)									BKPSDM	
								10%	10%	2. Surat pernyataan dari PPK yang menyatakan bahwa pejabat yang akan diangkat dan dilantik memiliki rekam jejak jabatan yang baik.							
								5%	5%	3. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi.							
								10%	10%	4. Berita Acara Pansel dan berita acara ujikom beserta dokumen pendukungnya.							
								5%	5%	5. Rekomendasi hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi dari Instansi berwenang							
					40%	40%	Pelaksanaan Promosi dan Mutasi (JA, JP) 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrator dan pengawas. (berisi a.l Dokumen perencanaan promosi dan mutasi, kesesuaian persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, memperhatikan kebutuhan organisasi, Berita Acara Tim Penilaian Kinerja (Baperjakat), SK Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan).								BKPSDM		
		2. Peningkatan Integritas dan Pengawasan	33%	28%	84%												
a. Manajemen Kinerja		34%	34%	100%	100%												
				40%	40%	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kontrak Kinerja (untuk JPT)						BKPSDM					
				40%	40%	2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan mengacu kepada: a. Perencanaan strategis b. Perjanjian kinerja c. Organisasi dan tata kerja d. Uraian jabatan											
				20%	20%	3. Laporan penilaian kinerja instansi (LAKIP dan LPPD 2023)						BKPSDM/Bag Organisasi					
						Catatan: a. Dokumen kontrak kinerja dan SKP tahun berjalan 2024. b. Laporan penilaian kinerja tahun 2023.					BKPSDM						
b. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)		33%	33%	100%	100%												
				10%	10%	1. Penjelasan berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst						Bag Organisasi					

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%	%								
				10%	10%	2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: Kehadiran					BKPSDM		
				10%	10%	Aktivitas harian							
				10%	10%	Capaian kinerja ASN							
				10%	10%	3. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP.							
				50%	50%	4. Data realisasi TPP pegawai di tahun berjalan (2024).							
				50%	50%								
		c. Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN	33%	17%	53%	100%							
					53%	100%	1. Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2024. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi). 2. Laporan Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian (BKD/ BKPSDM/ BKPP) atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun berjalan.					Inspektorat	
											BKPSDM dan Inspektorat		
		3. Budaya Antikorupsi	33%	23%	70%								
		a. Kepatuhan LHKPN	50%	50%	100%	100%							
					20%	20%	Kepatuhan 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait wajib lapor)					Inspektorat	
				20%	20%	2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif					Inspektorat		
				10%	10%	3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Direktur)					Inspektorat		
				25%	25%	Perluasan Wajib Lapor 1. Perkada/SK Kda perluasan Wajib Lapor yang memuat (Staf Khusus dan Ajudan Kepala Daerah) - (Nilai 25)					Inspektorat		
				25%	25%	2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus dan Ajudan) - (Nilai 25)							
	b. Pendidikan Antikorupsi ASN	50%	20%	40%	100%								
				20%	50%	Laporan implementasi pendidikan antikorupsi kepada ASN pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mencakup: a. Materi antikorupsi					BKPSDM dan Inspektorat		
				20%	50%	b. Dokumentasi kegiatan							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
					Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan)							
					1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan							
			5%	10%	a. Pendaftaran Pengukuran Tanah						Perkim	
			5%	10%	b. Pendaftaran Sertifikasi Tanah							
			5%	30%	2. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan							
			10%	35%	3. Jumlah total bidang BMD-Tanah						Perkim	
	c. Penguasaan Fisik BMD	25%	14%	55%	100%							
				35%	50%	Penguasaan Fisik BMD Tanah 1. Total Daftar Bidang Tanah 2. Daftar Bidang tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.					BKD	
				20%	50%	Penguasaan Fisik BMD Kendaraan 1. Total daftar kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) 2. Daftar Kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak					BKD	
	d. Penerimaan atas Pemanfaatan BMD	25%	25%	100%	100%							
				100%	100%	1. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan 2. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 Tahun 2021 untuk Target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan. *Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 3. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD Tahun berjalan.					BKD	
	2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	25%	14%	58%								
	a. Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	50%	35%	70%	100%							
				20%	50%	1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berjalan. 2. Dokumen Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun 'sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 3. Rekapitulasi Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).					BKD	

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%								
					4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD).							
					5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah.							
					6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).							
					1. Semester II Tahun 2023							
			12.5%	12.5%	> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan							
			12.5%	12.5%	> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan							
					2. Semester I Tahun 2024							
			12.5%	12.5%	> Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan							
			12.5%	12.5%	> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan.							
	b. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	50%	23%	45%	100%							
						1. Jumlah SKPD dan Rekap Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD.						
					2. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian:							
			5.0%	20%	a. Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan; (Bukti Berita Acara)							
			5.0%	20%	b. Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan (Bukti Berita Acara)							
			10.0%	10%	c. Rekonsiliasi antara bidang aset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara)							
			5.0%	5%	3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.							
			10.0%	35%	4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.							
			10.0%	10%	5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.							

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan	
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des			
			Bobot	%	%								
	b. Database Pajak Daerah Terintegrasi	33%	33%	100%	100%								
				25%	25%	Database Pajak Daerah 1. Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: - Manual - Berbasis elektronik					BKD		
				25%	25%	2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik						BKD	
				25%	25%	3. Pemanfaatan database digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD)							
				25%	25%	4. Database pajak terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah.							
	c. Pembayaran Online	33%	17%	50%	100%								
				50%	100%	Pembayaran Online Pajak Daerah 1. Rekap jenis pajak daerah yang sudah tersedia fasilitas kemudahan pembayaran online. 2. SOP pembayaran pajak secara online dengan lembaga perbankan. 3. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).						BKD	
	2. Peningkatan Pajak Daerah	33%	33%	100%									
	a. Implementasi Inovasi Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%								
			40%	40%	1. Laporan Inovasi pajak daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat: 1. Latar belakang dan permasalahan 2. Tujuan inovasi 3. Waktu pelaksanaan inovasi 4. Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif 5. Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi						BKD		
			60%	60%	2. Peningkatan Pajak Setelah Inovasi								

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
	b. Capaian Kinerja Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%							
				60%	60%	Capaian Kinerja Pajak Daerah 1. Target Pajak APBD Tahun berjalan. 2. Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan.					BKD	
			20%	20%	Capaian Penagihan Piutang Pajak daerah 1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat : a. Penyampalan tagihan b. Pemberian waktu pembayaran c. Pemberian surat Pemberitahuan d. Pemeriksaan lapangan e. Pemberian sanksi f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan) g. Rekonsiliasi dan Pelaporan 2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet						BKD	
				20%	20%	<u>Keterangan:</u> (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Th Anggaran 2023, Jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK						
	3. Pengendalian dan Pengawasan	33%	23%	70%								
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50%	50%	100%	100%							
				10%	10%	Pengawasan Pajak Daerah 1. SOP pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah						BKD
			20%	20%	2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan e. Kendala, hambatan, evaluasi							
				70%	70%	Efektivitas pengendalian dan pengawasan pajak daerah						


No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%								
	b. Reviu Pajak Daerah	50%	20%	40%	100%							
				20%	50%	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup: a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah. b. Penguatan database pajak daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak daerah. d. Upaya penagihan pajak daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.				Inspektorat		
				20%	50%	Tindak Lanjut Reviu a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. b. Capaian % TL Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024.				BKD		
											Inspektorat	
TOTAL NILAI		100	87,0	85,0%								

P. WALI KOTAPAGAR ALM.

ttd.

YUDHA KURNIA

No	Area Intervensi / Indikator / Sub Indikator	Bobot (Pedum 2024)	Nilai Dokumen/Evidence			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPD / Bagian	Keterangan
			Target		Pedum 2024		April	Juni	Sept	Des		
			Bobot	%	%							
	b. Reviu Pajak Daerah	50%	20%	40%	100%							
				20%	50%	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup: a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah. b. Penguatan database pajak daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak daerah. d. Upaya penagihan pajak daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.				Inspektorat		
				20%	50%	Tindak Lanjut Reviu a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. b. Capaian % TL Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024.				BKD		
TOTAL NILAI		100	87.0	85.0%						Inspektorat		

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I/II	
INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Catatan:

> Nilai dalam pedum adalah prosentase nilai setiap Dokumen / Evidence dalam mencapai (terhadap) nilai Sub Indikator yang ditetapkan dalam Pedum.

> Status Dokumen

H : Dokumen telah diverifikasi oleh verifikator MCP dengan nilai $\geq 90\%$ atau dengan nilai maksimal (tertinggi) yang telah ditetapkan pada masing - masing evidence

K : Kondisi dokumen :

- Dokumen sudah ada dan masih berada pada SKPA/Biro Penjab Dokumen.
- Dokumen sudah ada dan sudah diserahkan pada admin MCP KPK di Inspektorat tetapi belum di-upload
- Dokumen sudah di-upload tetapi belum diverifikasi oleh verifikator MCP KPK.
- Dokumen sudah di-upload dan sudah diverifikasi oleh verifikator MCP KPK tetapi nilainya $< 90\%$ (belum nilai tertinggi)

Nil : Dokumen belum ada